**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN VISI DESA**

**(STUDI DI DESA BARANGKA KECAMATAN KAPONTORI KABUPATEN BUTON**

****

**O L E H :**

**SARYATI**

**JURUSAN???PROGRAM STUDI?? ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

**BAUBAU**

**2018??**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakt setempat berddasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan kesatuan negara Indonesia. Masyarakat drsa biasa saling mengenal satu sama lainya serta meiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya bermata pencarian nelayan dan petani.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia (pasal 1 ayat 2 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa) desa di pimpin oeh kepala desa penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggara pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (widjaja, 2013). Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyedian sarana prasarana fasilitas umum desa.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa harus memiliki visi dan misi yang akan di jadikan landasan dasar bagi pemerintah desa. di mana visi yang ada merupakan jaminan tujuan dari pemerintah desa sehingga terjaminya kesatuan dan tujuan pemerintah desa dalam melaksanakan visi misi.berbicara tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Maka penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian yang terpentinng yang harus di perhatikan oleh pemimpinya khususnya kepala desa dalam menjalankan visi misinya untuk mewujudkan pembangunan desa. seperti yang di katakana oleh solekhan (2014:49) yang di lakukan oleh kepala desa melalui pembangunan desa di tuntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kepribadianya sehingga mampu memikul tanggung jawab yang besar baik dalam suatu organisasi pemerintah maupun swasta.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam pemerintah desa, perlu di tetapkanya tujuan yaitu sesuatu ( apa ) yang akan di capai atau di hasilkan dalam dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahuanan. Kebijakan pada dasarnya meerupakan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan ole yang berwenang untuk di jadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercpainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, serta visi dan misi pemerintah desa. sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang di laksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Di lihat dari pentingnya visi misi dalam membangun desa, semua desa di wajibkan memiliki visi misi yang bisa di jadikan landasan dari pembangunan desa. desa barangka adalah salah satu desa yang mempunyai visi misi yang cukup bagus dalam rangka membangun desa. adapun visi misi desa barangka :

Visi

“Barangka Berseri”

Terwujudnya masyarakat desa barangka yang bersih,religious, sejahtra, rapih, indah melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hokum dan berwawasan lingkungan dengan berorentasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat

Misi

Dan untuk menjalankan visi desa barangka di laksanakan misi dan program sebagai berikut :

1. Pembangunan jangka panjang
2. Melanjutkan pembangunan yang belum terlaksana
3. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan daran dan prasaran ekonomi warga
5. Pembangunan jangka panjang
6. Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa Barangka
7. Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
8. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Barangka.

Di lihat dari visi desa barangka yang menyentuh berbagai aspek dari kenersihan, religious, sejahtra, rapi, indah, pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hokum, dan lain sebainya hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di desa barangka dengan judul *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Visi Desa (Studi Di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton)*

1. **Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dalam penelitian maka berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha merumuskan masalhanya sebagai berikut:

1. Apa bentuk upaya yang sudah di lakukan pemerintah desa di desa barangka dalam rangka mewujudkan visi desa barangka
2. Apa yang menjadi penghambat dalam mewujudkan visi desa di desa barangka kecamatan kapontori kabupaten buton
3. **Tujuan Penelian**

Dengan adanya rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang sudah di lakukan pemerintah desa dalam mewujudkan visi desa di desa barangka kecamatan kapontori kabupaten buton
2. Factor-faktor apa saja yang menghambat dalam mewujudkan visi desa di desa barangka kecamatan kapontori kabupaten buton
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu pemerintah desa di desa barangka agar lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa agar terwujudnya pembangunan desa sesuai dengan visi desa.
2. Sebagi bahan informasi yang dapat menambah wawasan tentang pembangunan pemerintahan desa dan bahan studi perbandingan bagi peneliti lain yang berminat meneliti topik yang sama.
3. Sebagai bahan masukan yang sangat berharga bagi peneliti mengenai penjelasan teori-teori yang ada serta prakteknyatanya di dunia kerja.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Kinerja**

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah diraih. Sehingga setelah diketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi.

Menurut Pasolong (2010:175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah kinerja pegawai desa barangka.

Konsep kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kinerja menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat kinerja pemerintah desa berdasarkan visi desa barangka.

Menurut Fahmi (2013: 127) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu, sedangkan menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang diperoleh atau tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis suatu organisasi.

1. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Menurut Armstrong dan Baron (Wibowo,2011: 100), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai berikut:

1. *Personal factor*, ditunjukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
2. *Leadership factor,* ditentukan oleh kualitas, dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer dan *team leader.*
3. *Team factor,* ditunjukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
4. *System factor,* ditunjukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi.
5. *Contextual/situational factor,* ditunjukan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Dari pendapat ahli di atas dapat dilihat ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari kinerja seorang pegawai adalah tingkat keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Apabila seorang pegawai memiliki tingkat keterampilan dan kompetensi yang tinggi maka kinerja dari pegawai juga akan baik. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat keterampilan dan kompetensi pegawai rendah maka kinerjanya juga akan rendah. Kinerja yang akan di lihat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah desa barangka dalam mewujudkan visi desa.

1. **Konseo Pemerintah Desa**

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, megakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pesmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peratuan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada sasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

1. **Konsep Pembangunan**

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memADAI. Menurut nation-building Sondong P.Siagian (2001:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tetang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya, sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Syansi Yuswar Zainal Basri & Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan system yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan social ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap Negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancer, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012).

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Memtode ini di gunakan dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2010:5), yaitu:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informasi.
3. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4. **Variabel Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua variable yaitu strategi pemerintah desa sebagai variable bebas (X) dan meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan visi desa barangka kecamatan kapontori kabupaten buton.

1. **Definisi Operasional**
2. Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan Pemerintah desa yang dimaksud adalah aparatur yang paling menguntungkan.
3. Desa yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa barangka kecamatan kapontori kabupaten buton.
4. Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi.
5. **Populasi dan Sampel**
6. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130), adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penduduk desa barangka dan aparatur desa barangka.
7. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi (Sugiyono,2011:12). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *proposive sampel* yaitu sampel yang diambil secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden/informasi yang dipilih dengan banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi (Sugiyono,2011:23). Untuk menentukan jumlah informan dalam penelitian ini, sebelumnya ditentukan *key informan* di mana seorang *key informan* diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan hal itu maka sampel dalam penelitian ini 7 orang informasi, yang terdiri atas :
8. Kepal Desa 1 orang
9. Sekretaris Desa 1 orang
10. Ketua BPD 1 orang
11. Kepala Dusun 1 orang
12. Masyarakat 3 orang
13. **Teknik Pengempulan Data**

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2010:112), mengatakan bahwa untuk mengumpulkan berbagai data, keterangan dan informasi digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*), yakni peneliti melakukan hanya jawab langsung dengan Kepala Desa, Kepala Seksi Desa, dan masyarakat.
2. Pengamatan langsung (*observasi*), melakukan pengamatan dan penelitian langsung dilokasi penelitian untuk melengkapi dan mendukung data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara.
3. Studi dokumentasi Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan berbagai data dari informasi yang tersedia dari berbagai lembaga yang terkait dengan keperluan penelitian, yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan, makalah, internet, rencanakerja Kepala Desa, dan laporan BPD.
4. Studi Kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.
5. **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah data kualitatif dan di dukung pula dengan data kuantitatif yang menampilkan beberapa table frekuensi dari hasil penelitian.Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisa secara statistik deskriptif, yaitu suatu analisa yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari data wawancara/kuesioner.

1. **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton lokasi ini dipilih karena pertimbangan legelitas bahwa desa barangka sebagai sala satu desa yang berurusan dengan Perwujudan Visi Pembangunan Desa.